

ANALISIS PENERAPAN QUICKRESPONSE INDONESIAN STANDARD DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA PUNIA PADA PURA JAGATNATHA, SINGARAJA

I Gst. Ag. Gd. Wahyu Widhi Atmika¹, Luh Gede Erni Sulindawati²

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indoneisa

e-mail: {1wahyuwidhi8@gmail.com, 1erni.sulindawati@undiksha.ac.id}

ABSTRAK

Quick Response Indonesian Standard (QRIS) merupakan sebuah sistem pembayaran nontunai dengan media ponsel pintar yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2019 Bank Indonesia memberikan kesempatan bagi BPD Bali untuk meluncurkan QRIS. Penggunaan QRIS BPD Bali tidak hanya untuk transaksi profit, namun sebagai bantuan sosial seperti dana punia di Pura. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan implikasi QRIS terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana punia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilakukan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Komponen yang dianalisis adalah efektivitas QRIS, pendapat *pemedek* dan pengelola pura serta bagaimana implikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana punia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa QRIS dinilai kurang efektif karena kurangnya sosialisasi, pola pikir *pemedek* yang konvensional dan kurangnya nilai spiritual sehingga tidak dapat memberikan peningkatan yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana punia di Pura Jagatnatha Singaraja.

Kata Kunci: QRIS, Dana Punia, Akuntabilitas, *Pemedek*

Abstract

Quick Response Indonesian Standard (QRIS) is a non-cash payment system that use smartphone for its media in which this system was launched by Bank Indonesia. In 2019 Bank Indonesia gave a permission for BPD Bali to launch QRIS. The usage of QRIS BPD Bali is not only for profit transactions, but also as social funding such as punia funds at temples. The purpose of this study was to prove the implications of QRIS for increasing accountability in the management system of punia funds. This study used descriptive qualitative method. The data were obtained through observation, interviews and documentation, which were then carried out by reducing, presenting data and drawing conclusions. The analyzed components were the effectiveness of QRIS, the opinions of pemedek and temple administrators and the implications for the accountability of punia fund management. The results of the study concluded that QRIS was considered ineffective due to lack of socialization, conventional believer mindset and lack of spiritual values so that it failed to provide a significant increase in the accountability of punia fund management at Jagatnatha Temple Singaraja.

Keywords: QRIS, Punia Fund, Accountability, Believer

PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki era disrupsi yang ditandai dengan pergeseran fundamental aktivitas masyarakat yang awalnya cenderung manual dan konvensional menuju ke arah penggunaan teknologi. Berdasarkan data yang disajikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), menyatakan bahwa penetrasi penggunaan Internet pada tahun 2019 di Indonesia mencapai 64,8% yang telah meningkat sejumlah 10,12% pada tahun 2018, yaitu sejumlah 54,68%. Kondisi ini mendukung adanya teori bahwa Indonesia kini telah memasuki era disrupsi yang memanfaatkan teknologi dalam menjalankan kegiatannya. Dikutip dari laman resmi CNN Indonesia, Bali menduduki posisi keempat dengan tingkat pertumbuhan teknologi terpesat di Indonesia, yaitu sebanyak 5,63% dibawah DKI Jakarta (7,41%), Yogyakarta (6,12%), dan Kalimantan Timur (5,84%). Perkembangan yang cukup masif ini memberikan kesempatan yang baik untuk merubah pola masyarakat ke arah *cashless society*. Secara harfiah, kata *cashless* berarti tanpa uang tunai. Bank Indonesia menerapkan sebuah program yang mendukung adanya gerakan *cashless* tersebut dengan mengeluarkan program *Quick Responses Code Indonesian Standard* (QRIS) yang didelegasikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. QRIS merupakan standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Peluncuran QRIS juga merupakan perwujudan dari visi Sistem Pembayaran Indonesia pada 2025. Dalam penerapannya, BPD Bali tidak hanya menyasar pelaku UMKM yang bergerak pada sektor ekonomi saja, akan tetapi pihak BPD Bali menyasar tempat persembahyangan khususnya Pura dalam menerapkan *dana punia* secara virtual menggunakan program QRIS ini. Pada praktiknya, program QRIS ini telah diterapkan sebelumnya oleh beberapa bank lainnya seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), serta Bank Central Asia (BCA), akan tetapi hanya

Bank Pembangunan Daerah Bali yang menerapkan program QRIS BPD ini untuk kegiatan *dana punia* di pura. Menilik atas fakta tersebut, maka program QRIS BPD ini menarik untuk diteliti khususnya dalam penerapannya pada kegiatan *dana punia*. Terlebih lagi belum ada penelitian yang meneliti tentang program QRIS BPD yang diterapkan pada kegiatan *dana punia*. *Dana punia* bisa diartikan sebagai pemberian yang baik dan suci dengan tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran dharma. *Dana punia* merupakan suatu sarana untuk meningkatkan *sradha* dan bhakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain itu dengan *berdana punia* akan membangun sikap kepedulian kita terhadap sesama (Inputbali, 2016). Penggunaan QRIS BPD ini diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan *dana punia* di pura yang bersangkutan. Menurut Mardiasmo (2002), pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Pada praktiknya, terdapat beberapa oknum pengelola *dana punia* "nakal" yang menyalahgunakan wewenang dan tidak jujur dalam menyalurkan pendanaan dengan mengambil sejumlah *punia* untuk kepentingan pribadi. Menurut Sri Wahyuni, anggota dari Badan *Dana punia* Hindu Nasional (BDPHN) menyatakan bahwa terdapat 144 kasus penyalahgunaan *dana punia* yang dilakukan oleh pengelola pura di Bali serta satu kasus pada mantan Rektor Prod. Made Titib serta Dr. Praptini dalam hal pengadaan barang dan jasa pada IHDN Denpasar yang mencapai kerugian mencapai 379 juta. Beranjak dari data tersebut, penerapan program QRIS BPD diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan *dana punia*.

Melihat permasalahan yang timbul di lapangan terkait dengan penerapan sistem pembayaran QRIS, maka sistem ini merupakan sebuah inovasi yang menarik untuk diteliti. merchant maupun masyarakat konsumen. Dalam penelitian ini akan difokuskan ke penerapan QRIS pada

organisasi *non profit* khususnya pada *dana punia* di Pura. Salah satu pura yang telah menerapkan program QRIS dalam pelaksanaan kegiatan *dana punia* yaitu Pura Jagatnatha Singaraja. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur penggunaan QRIS, meninjau kelemahan program ini, mengkaji implementasi QRIS terhadap akuntabilitas pengelolaan dana punia, serta mengkaji respon *pemedek*.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif digunakan pada penelitian ini karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi di masa sekarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam menganalisa penerapan QRIS BPD Bali dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan *dana punia* yang berlokasi di Pura Jagatnatha Buleleng.

Penelitian ini dilakukan menggunakan data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, baik melalui observasi maupun wawancara dengan informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung terhadap pihak BPD Bali dan pengelola *Dana punia* pada Pura Jagatnatha Singaraja. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi maupun data yang diperoleh melalui penelitian pihak lain. Pada penelitian ini, data sekunder berupa hasil penelitian terkait, artikel pada jurnal ilmiah serta data penerapan QRIS BPD khususnya pada *dana punia* pada Pura Jagatnatha Singaraja.

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan mencakup proses pencairan dan pengaturan secara sistem hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman dan menyajikan apa yang telah ditemukan (Mantja, 2007). Proses analisis

dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai *pemedek*, pengelola Pura Jagatnatha Singaraja, serta pihak BPD Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

QRIS merupakan sebuah sistem transaksi virtual yang melibatkan penyedia jasa (*merchant*) dengan konsumen. Penggunaan QRIS sejalan dengan tema HUT RI ke-74 yaitu unggul dan maju, yang mendukung adanya gerakan *cashless society* atau tanpa uang tunai. Program QRIS ini merupakan wujud kolaborasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang kemudian memberikan delegasi kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Prosedur Penggunaan QRIS BPD Bali

Dalam penerapannya, sistem QRIS dapat dikatakan masih sangat baru karena penggunaannya baru efektif di awal tahun 2020 ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang awam dan belum mengetahui bagaimana cara penggunaan QRIS. Tidak hanya konsumen, beberapa calon *merchant* juga masih belum memahami bagaimana prosedur penggunaan sistem pembayaran QRIS ini. Prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2013). Dalam hal ini, akan dipaparkan prosedur penggunaan QRIS baik bagi merchant maupun konsumen. Bagi merchant, Akuisi merchant merupakan langkah awal dalam pengaplikasian sistem QRIS. Akuisisi merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang atas aset suatu perusahaan. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor, sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum

yang berdiri sendiri (Sudana, 2011). Proses akuisisi ini bertujuan untuk menentukan bank penyedia jasa QRIS yang akan diajak bekerjasama dalam penerapannya, dalam kondisi ini pihak bank yang dituju untuk mengakuisis merchant adalah Bank BPD Bali. Langkah selanjutnya yaitu pendaftaran. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar yaitu pencatatan nama, alamat dsb dalam daftar (Depdikbud01, 2012). Dalam hal ini, pendaftaran dilakukan oleh pihak merchant kepada *acquirer*. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain. Pendaftaran dilakukan untuk mencatat data-data yang terdiri dari data diri, nomor rekening dan jenis atau kategori merchant. Ketika pendaftaran telah dilakukan, proses selanjutnya adalah pendaftaran pada PTEN. PTEN merupakan singkatan dari Penyelesaian Transaksi, Elektronik, Nasional yang merupakan produk dari Bank Indonesia sebagai gerbang pembayaran nasional. PTEN berperan dalam mengurus proses transaksi elektronik. Peran PTEN dalam proses penerbitan QRIS oleh merchant sangatlah penting karena PTEN yang meneruskan proses verifikasi bagi merchant.

Setelah diverifikasi, PTEN akan mendistribusikan NMID (*National Merchant ID*) kepada *acquirer*. Setelah diterima, maka pihak *acquirer* kemudian akan melakukan registrasi *user merchant*. Tahap terakhir adalah pendistribusian label QRIS serta aktivasi merchant. Aktivasi akan dilakukan pada aplikasi “BPD Bali Merchant” dengan mengklik tombol aktivasi, mengisi data diri yang telah didaftarkan pada *acquirer*, serta menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera pada aplikasi. Setelah disetujui, *merchant* membuat *mobile pin* yang merupakan kode rahasia atau *password* untuk mencegah adanya akses yang tidak diinginkan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Adapun fitur yang tersedia pada aplikasi bpd bali merchant meliputi cek saldo dan monitoring transaksi, cek mutasi rekening merchant, transaksi dengan qr dinamis, history qr dinamis, refund transaksi, cetak ulang struk transaksi, cetak/email rekap transaksi, ubah PIN, ubah

email, ubah password, ubah foto profil, lupa *password*.

Bagi konsumen, penggunaan QRIS dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui aplikasi BPD Bali Mobile dan aplikasi dompet virtual lainnya, seperti OVO, Go-pay, Dana, dan lain sebagainya. Bagi pemilik BPD Bali Mobile Langkah pertama yang dilakukan adalah konsumen mengunduh aplikasi *m-banking* pada ponsel pintar yang bernama “BPD Bali Mobile”. Kemudian konsumen melakukan aktivasi *m-banking* pada mesin ATM, dengan memasukkan nomor ponsel yang digunakan pada saat membuka rekening BPD Bali. Apabila telah melakukan aktivasi, maka lakukan verifikasi pada aplikasi BPD Bali Mobile serta lakukan registrasi yang meliputi memasukkan id, pin dan keperluan dalam pembuatan akun lainnya. Setelah melakukan verifikasi, pilih menu “transaksi QRIS” lalu pindai kode QR pada *merchant* tempat bertransaksi. Masukkan nominal transaksi dan nomor telepon maka transaksi telah berhasil dilakukan dengan memotong saldo rekening pada Bank BPD Bali. Sedangkan, bagi pemilik dompet virtual lainnya, Lakukan pengunduhan pada dompet digital yang ingin digunakan seperti OVO, Go-Pay, DANA atau lainnya. Kemudian lanjutkan verifikasi sesuai dengan arahan dari aplikasi yang bersangkutan. Setelah melewati tahap verifikasi, maka lakukan pengisian saldo melalui bank ataupun toko yang menyediakan jasa pengisian ulang saldo atau dikenal dengan istilah *top up*.

Setelah melakukan pengisian saldo, lakukan pembayaran dengan langkah yang sama seperti menggunakan aplikasi BPD Bali Mobile. Transaksi yang dilakukan akan memotong jumlah saldo pada aplikasi yang sebelumnya telah diisi ulang. Keunggulan dari QRIS adalah memungkinkan seluruh aplikasi dompet virtual melakukan transaksi pada *merchant* yang berlogo QRIS. Berbeda halnya saat sebelum QRIS diluncurkan, transaksi antar dompet virtual tidak bisa dilakukan, misalkan pengguna OVO tidak dapat melakukan transaksi pada *merchant* yang menggunakan *go-pay*, dan begitu sebaliknya. Dengan adanya sistem pembayaran yang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan, maka

seluruh transaksi dapat dilakukan dengan dompet virtual apapun yang telah resmi di Indonesia. Penggunaan QRIS selain dapat dilakukan pada organisasi yang berorientasi pada profit atau *profit-oriented merchant*, sistem pembayaran QRIS ini juga dapat digunakan atau diterapkan pada organisasi nirlaba atau organisasi maupun *merchant* yang bersifat sosial. Salah satu contohnya adalah pada tempat persembahyangan yang oleh Umat Hindu disebut dengan Pura. BPD Bali, sebagai *acquirer* selain menysasar *merchant* yang bersifat dagang atau profit, juga menysasar pada *merchant* yang bersifat sosial seperti pura. dikutip dari laman resmi Bank BPD Bali hingga saat ini tercatat sejumlah 400 Pura di Bali sudah menerapkan QRIS sebagai sarana dalam *berdana punia*. salah satunya adalah Pura Jagatnatha, Singaraja yang telah menerapkan QRIS sejak awal bulan Februari 2020. Cara *berdana punia* melalui QRIS sama dengan bertransaksi pada *merchant* lainnya yaitu dengan melakukan pemindaian pada logo QRIS yang telah disediakan.

Berdana punia melalui sistem QRIS akan memberikan rasa keamanan, dikarenakan nominal yang disumbangkan akan otomatis terdebit pada rekening bank yang dimiliki oleh pura. Kondisi ini dapat memberikan kemudahan baik bagi *pemedek* maupun bagi pengelola pura. Bagi *pemedek*, *berdana punia* melalui QRIS akan sangat mudah dilakukan karena tidak perlu membawa uang kas, sedangkan bagi pengelola pura, penggunaan QRIS dapat memudahkan dalam pertanggungjawaban karena *dana punia* yang masuk akan otomatis tercatat pada mutasi rekening BPD yang dimiliki.

Kendala Penerapan Program

Program QRIS merupakan suatu hal baru bagi beberapa masyarakat yang masih awam, terlebih lagi dalam *bedana punia*. Maka dari itu, terlepas dari segala kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, program QRIS memiliki beberapa kelemahan yang dapat dirasakan oleh pihak pengelola pura selaku *merchant* maupun pihak *pemedek* selaku konsumen. Bagi pengelola pura, Penggunaan QRIS pada *dana punia* di Pura khususnya yang tergolong pada kategori bantuan sosial,

sehingga tidak dikenakan MDR. Meski demikian, penggunaan QRIS pada sistem *dana punia* di pura tidak luput dari kendala. Seperti halnya yang dihadapi oleh Pura Jagatnatha, Singaraja, sebagaimana dipaparkan oleh pemangku dan pengelola Pura Jagatnatha, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola pura dalam menerapkan sistem *dana punia* dalam menggunakan QRIS, diantaranya adalah kurangnya literasi keuangan serta pola pikir masyarakat yang lebih memilih *berdana punia* dengan menggunakan uang tunai dibandingkan dengan uang digital.

Sama halnya dengan kendala yang dihadapi oleh *merchant* yang berorientasi pada profit, pemangku serta pengelola Pura Jagatnatha, Singaraja sebagai *merchant* yang masuk pada kategori bantuan sosial juga mengalami kendala ini. Kondisi ini juga diakibatkan oleh usia pemangku dan pengelola Pura Jagatnatha yang ada pada kisaran 40 tahun ke atas dan tidak berkecimpung di dunia IPTEK sehingga sulit untuk memahami adanya sebuah sistem yang belum familiar. Terlebih lagi, sistem QRIS ini memerlukan seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi BPD Bali Merchant yang tidak semua pengelola dan pemangku bisa mengoperasikannya. Selain itu, kendala juga dirasakan karena masyarakat sebagai *pemedek* di Pura Jagatnatha masih memilih menggunakan uang tunai dibandingkan menggunakan uang digital. Para *pemedek* masih meragukan dan mengkhawatirkan adanya kesalahan sistem dan ketidakjelasan dari *dana punia* yang mereka sumbangkan akan masuk ke mana. Maka dari itu, hanya sedikit yang mau melakukan *dana punia* dengan menggunakan sistem digital.

Sedangkan bagi *pemedek* selaku konsumen, Berdasarkan keterangan dari beberapa *responden*, maka terdapat beberapa kendala yang dapat dituangkan ke dalam beberapa garis besar yaitu kurangnya sosialisasi, dinilai kurang praktis dan kurangnya nilai spiritual. Masih banyak yang belum mengetahui bahwa pada Pura Jagatnatha sudah bisa melakukan *dana punia* secara non-tunai atau melalui QRIS, yaitu 8 dari 10 *responden* menyatakan ketidaktahuannya terhadap adanya sistem

QRIS dalam *berdana punia*. Kondisi ini diakibatkan oleh belum adanya sosialisasi terpadu terkait pengenalan program QRIS pada masyarakat luas, khususnya untuk *dana punia* di pura. Selama ini masyarakat hanya mengetahui QRIS lewat diterapkan pada UMKM saja, namun belum mengenal hadirnya sistem ini pada *dana punia*. Selain itu, *Berdana punia* melalui QRIS dirasa kurang praktis bagi kebanyakan masyarakat. Selain karena belum terbiasa, menggunakan uang elektronik dianggap tidak memiliki keunggulan yang signifikan apabila dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Terlebih lagi *pemedek* harus mengunduh aplikasi yang memerlukan ponsel pintar dan kapasitas penyimpanan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dari 10 *pemedek*, 7 di antaranya menyatakan bahwa menggunakan media sebagai alat untuk melakukan *dana punia* dirasa tidak memiliki kepuasan yang sama apabila dibandingkan dengan *berdana punia* dengan menggunakan uang tunai. Beberapa juga menyatakan bahwa *berdana punia* dengan uang tunai diyakini atas dasar tulus dan ikhlas, yang bila dibandingkan dengan *berdana punia* menggunakan media uang elektronik hanya akan dijadikan sebagai ajang perlombaan dan menunjukkan gengsi semata.

Implikasi Penerapan QRIS terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia

Dana punia pada Pura Jagatnatha Singaraja ini dapat berupa uang maupun sarana prasarana seperti alat kebersihan, peralatan sembahyang maupun produk pangan seperti beras, air minum kemasan serta hal lainnya. *Dana punia* berupa uang tunai akan dihimpun baik melalui kotak sesari maupun secara langsung diberikan kepada pengelola *dana punia* di Pura Jagatnatha. Sistem terbaru diterapkan yaitu menggunakan media QRIS yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan kali ini. Kemudian untuk *dana punia* yang berupa barang atau peralatan akan langsung dicatat pada buku inventaris yang dibukukan oleh pihak pengelola Pura Jagatnatha. *Dana punia* yang dilakukan dengan metode konvensional atau uang tunai, khususnya pada kotak sesari akan dihimpun terlebih

dahulu kemudian dilakukan pencatatan secara kumulatif tiap 1-2 bulan sekali. Semua didasari atas rasa percaya terhadap *kharma phala*. Ajaran *kharma phala* merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh Umat Hindu yang menjelaskan hukum sebab akibat, yaitu segala hal yang dialami maupun dinikmati tidak lepas dari buah perbuatan sebelumnya. Pengelolaan *dana punia* selama ini hanya didasari atas sistem *kharma phala* ini, sehingga apabila ada kecurangan akan kembali pada diri pribadi orang yang bersangkutan. Pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas terdapat dua jenis yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan terhadap atasan, yang pada konteks ini adalah lembaga yang menaungi *dana punia*, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat dan pihak eksternal, sehingga tidak melibatkan atasan maupun bawahan. Pada konteks ini wujud akuntabilitas horizontal dilakukan kepada pihak pengelola Pura Jagatnatha dan masyarakat Banjar Jawa, Kecamatan Singaraja. Pura Jagatnatha Singaraja hanya mewujudkan akuntabilitas secara horizontal yaitu melaporkan pengelolaan keuangan kepada *prajuru* adat Banjar Jawa serta masyarakat pada kegiatan *Odalan* Pura Jagatnatha. Aspek-aspek yang dilaporkan kurang lebihnya berupa pemasukan dan pengeluaran atas *dana punia* pada periode yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan *dana punia*, Pura Jagatnatha Singaraja menerapkan 5 aspek akuntabilitas, yaitu transparansi, kewajiban, kontrol, tanggungjawab dan responsif. Kelima aspek akuntabilitas tersebut telah diterapkan jauh sebelum program QRIS diperkenalkan di Pura Jagatnatha Singaraja. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2004). Pada praktiknya, transparansi yang dilakukan oleh pengelola atau pihak Pura Jagatnatha Singaraja berupa pelaporan

secara lisan bagaimana *dana punia* itu dikelola pada saat *odalan* Pura Jagatnatha Singaraja. Pelaporan dilakukan dengan membacakan laporan pertanggungjawaban perihal pemasukkan maupun pengeluaran *dana punia*. Laporan tersebut meliputi nominal penerimaan dan pengeluaran, untuk apa saja dana tersebut digunakan, serta berapa sisa pasca penggunaan *dana punia* tersebut pada periode yang bersangkutan. “Pelaporan dilakukan kepada masyarakat umum yang *tangkil* pada saat *odalan* di Pura Jagatnatha. Sebelum pelaporan tersebut diumumkan kepada masyarakat umum, sebelumnya dilakukan pelaporan kepada *prajuru* adat desa Banjar Jawa untuk disetujui”, jelas Made Susila. Sebagai suatu kesatuan organisasi non-profit yang masih terikat dengan desa adat, Pura Jagatnatha Singaraja sudah menerapkan prinsip atau aspek transparansi yang menjadi tolak ukur dilaksanakannya akuntabilitas pada suatu organisasi. Aspek selanjutnya adalah kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam konteks liabilitas merupakan suatu sistem politis yang memberikan kebijakan bagi suatu individu untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Pada praktiknya, kewajiban atau liabilitas yang diterapkan pada sistem pengelolaan *dana punia* di Pura Jagatnatha Singaraja dilakukan dengan mengenakan sistem *reward and punishment* bagi individu yang melakukan kecurangan terhadap *dana punia* baik pencurian maupun konsumsi pribadi di luar kepentingan pura.

Sebagai suatu organisasi yang masih terikat dengan awig-awig atau aturan adat suatu desa adat, maka setiap individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi tersebut berkewajiban dalam mengikuti awig-awig desa adat tersebut. Seperti halnya Pura Jagatnatha Singaraja yang masih menjadi bagian dari Desa Adat Banjar Jawa yang hendaklah mengikuti awig-awig yang ditetapkan oleh desa adat tersebut. Jika terdapat kecurangan pada *dana punia* maka pelaku akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan mengembalikan sesuai dengan jumlah maupun nominal yang diambil. Apabila tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka akan ditindaklanjuti dengan diberikan sanksi adat yang telah disepakati

sebelumnya. Pada aspek ini, peranan QRIS seharusnya mampu menjadi media dalam meningkatkan akuntabilitas khususnya dalam mewujudkan kewajiban. Kondisi ini dikarenakan dana yang tersalur dari *pemedek* akan secara otomatis akan masuk ke rekening atas nama Pura Jagatnatha Singaraja. Dengan demikian dapat mengurangi potensi kecurangan khususnya pencurian serta konsumsi pribadi terhadap *dana punia* sehingga diharapkan mampu menjadi sarana dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan *dana punia*. Aspek berikutnya adalah kontrol merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menganalisa suatu akuntabilitas yang diterapkan. Pada praktiknya, konsep kontrol belum sepenuhnya diterapkan pada pengelolaan *dana punia* di Pura Jagatnatha. Penerapan program QRIS diharapkan mampu menjadi suatu kontrol terhadap dana yang tersalur ke rekening Pura Jagatnatha Singaraja. Kontrol sangat diperlukan terlepas dari sistem kepercayaan yang sudah dipegang erat selama ini untuk menghindari adanya kecurangan terhadap pengelolaan di masa yang akan datang. Aspek terakhir adalah aspek berikutnya adalah aspek tanggungjawab.

Tanggungjawab merupakan suatu sikap menyanggupi tugas yang diterima termasuk risiko yang terdapat pada tugas tersebut. Bertanggung jawab berarti individu yang bersangkutan menyatakan kesediannya menjalankan suatu tugas maupun amanat beserta konsekuensi yang mungkin terjadi. Pada praktiknya, aspek tanggungjawab terhadap pengelolaan *dana punia* pada Pura Jagatnatha diwujudkan melalui pembuatan laporan keuangan sederhana yang disusun oleh pengelola. Laporan keuangan yang memuat penerimaan serta penggunaan kas menjadi wujud pertanggungjawaban terhadap pengelolaan *dana punia* yang telah dipercayakan. Laporan tersebut kemudian dibahas pada *sangkep* atau rapat *prajuru* desa adat Banjar Jawa yang kemudian dibacakan saat *odalan* di Pura Jagatnatha Singaraja, yaitu setiap 6 Bulan sekali.

Aspek terakhir yaitu responsif atau pemenuhan tuntutan. Tuntutan yang dimaksudkan adalah apakah dana yang tersalurkan sudah sesuai atas harapan

masyarakat. Seperti halnya banten, pengadaan sarana prasarana, perbaikan pelinggih, dan aspek-aspek substantif lainnya. Sejauh ini belum ada keluhan dari masyarakat terkait dengan hal hal tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh *dana punia* yang masuk sudah digunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan, peran QRIS dalam *dana punia* masih belum memberikan peningkatan secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan *dana punia*. Kondisi ini disebabkan oleh dua hal. Pertama upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan *dana punia* sudah dilakukan jauh sebelum program QRIS diperkenalkan, sehingga pasca penerapan QRIS tidak memberikan peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan *dana punia*. Kedua, masyarakat cenderung lebih memilih melakukan *dana punia* dengan metode konvensional dibandingkan melalui sistem pembayaran digital. Kondisi ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab berikutnya terkait dengan respon masyarakat terhadap program QRIS dalam *dana punia* ini.

Respon Masyarakat (Pemedek)

Salah satu contoh sistem bantuan sosial digital adalah penerapan QRIS pada *dana punia* di Pura. Dalam menerapkan suatu sistem baru, tentu akan menimbulkan suatu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh masyarakat khususnya *pemedek* Pura Jagatnatha Singaraja saat diwawancarai perihal program QRIS BPD pada kegiatan *dana punia* yang dapat dikelompokkan sebagai pendapat pro dan kontra. Saat dilakukan wawancara kepada beberapa *pemedek* Pura Jagatnatha Singaraja, terdapat beberapa *pemedek* yang mendukung adanya program ini, pernyataan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 pokok utama, yaitu tidak melibatkan kas dan menghindari adanya penggelapan atau kecurangan. Menggunakan sistem digital dalam kegiatan yang biasanya melibatkan kas dalam transaksinya memberikan keuntungan bagi masyarakat moderen yang cenderung bertransaksi tanpa uang kas atau dikenal dengan istilah *cashless*. Penggunaan QRIS akan menjadi sebuah

solusi bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan transaksi digital melalui media uang elektronik. Melalui QRIS, *dana punia* dapat dilakukan hanya dengan melakukan pemindaian pada kode QR yang disediakan dan memasukkan nominal yang ingin didonasikan. Sedangkan Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa pendapat yang tidak mendukung diterapkannya program QRIS ini yang dapat disimpulkan menjadi 3 pokok utama, yaitu kurangnya sosialisasi, dinilai kurang praktis dan kurangnya nilai spiritual. Kurangnya sosialisasi dapat dilihat dari masih banyaknya yang belum mengetahui bahwa pada Pura Jagatnatha sudah bisa melakukan *dana punia* secara non-tunai atau melalui QRIS, yaitu 8 dari 10 *responden* menyatakan ketidaktahuannya terhadap adanya sistem QRIS dalam *berdana punia*. Kondisi ini diakibatkan oleh belum adanya sosialisasi terpadu terkait pengenalan program QRIS pada masyarakat luas, khususnya untuk *dana punia* di pura. Selama ini masyarakat hanya mengetahui QRIS lewat diterapkan pada UMKM saja, namun belum mengenal hadirnya sistem ini pada *dana punia*.

Kemudian program ini dinilai kurang praktis oleh sebagian besar *pemedek*. “*Berdana punia* melalui QRIS saya rasa kurang praktis bagi kebanyakan masyarakat. Selain karena belum terbiasa, menggunakan uang elektronik dianggap tidak memiliki keunggulan yang signifikan apabila dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Terlebih lagi *pemedek* harus mengunduh aplikasi yang memerlukan ponsel pintar dan kapasitas penyimpanan yang memadai”, jelas Mahendra saat ditemui di area Pura Jagatnatha Singaraja. Kurangnya nilai spiritual menjadi salah satu alasan lebih baik menggunakan metode konvensional atau *berdana punia* secara langsung dibandingkan harus menggunakan QRIS terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara dari 10 *pemedek*, 7 di antaranya menyatakan bahwa menggunakan media sebagai alat untuk melakukan *dana punia* dirasa tidak memiliki kepuasan yang sama apabila dibandingkan dengan *berdana punia* dengan menggunakan uang tunai. “*Berdana punia* dengan uang tunai diyakini atas dasar tulus dan ikhlas, yang bila dibandingkan

dengan berdana *punia* menggunakan media uang elektronik hanya akan dijadikan sebagai ajang perlombaan dan menunjukkan gengsi semata.” tegas Suarni, salah satu *pemedek*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

QRIS merupakan suatu program transaksi non-tunai yang menggunakan aplikasi pada ponsel pintar sebagai mediana. BPD Bali mengimplementasikan QRIS pada sistem *dana punia* di Pura, contohnya Pura Jagatnatha Singaraja. Sebagai sebuah terobosan baru, banyak masyarakat yang masih belum memahami bagaimana mengoperasikan program ini, baik bagi konsumen maupun *merchant*. Sebagai *merchant*, program ini dapat digunakan melalui serangkaian prosedur, mulai dari tahap pendaftaran hingga penyerahan logo QRIS oleh pihak *acquirer* kepada *merchant*. Sedangkan bagi konsumen, QRIS dapat digunakan dengan mengunduh aplikasi BPD Bali mobile ataupun dompet virtual lainnya.

Selain menawarkan efisiensi, program ini dirasa memberikan kendala bagi pengguna atau *pemedek*, serta pengelola pura yang bertindak sebagai *merchant*. Bagi *Merchant*, kendala utama yang dihadapi adalah tingkat melek teknologi pengelola pura yang kurang, karena rata-rata pengelola pura berusia di atas 40 tahun. Sedangkan bagi *pemedek*, selain teknologi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program serta rasa spiritual yang menjadi kendala diterapkannya program ini.

Pura Jagatnatha telah menerapkan konsep-konsep akuntabilitas yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Sehingga, penggunaan program QRIS BPD Bali pada kegiatan berdana *punia* tidak memberikan peningkatan yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana *Punia* di Pura Jagatnatha Singaraja.

Program ini menimbulkan pendapat pro dan kontra pada masyarakat khususnya *pemedek*. Masyarakat yang mendukung adanya program ini didasari atas efisiensi dan efektivitas tanpa menggunakan uang tunai. Sedangkan masyarakat yang tidak mendukung adanya program ini didasari atas ketidak tahuan karena kurangnya

sosialisasi, dirasa kurang nilai spiritual dan tidak didasari atas rasa tulus ikhlas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum siap untuk menyambut adanya perubahan di sistem *dana punia* yang masih memihak pada metode konvensional. Sehingga, penerapan program ini pada sistem *dana punia* khususnya di Pura Jagatnatha, Singaraja tidak memberikan peningkatan yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan *dana punia* di Pura Jagatnatha.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang mengemukakan permasalahan terkait implikasi penerapan QRIS BPD Bali terhadap kegiatan berdana *punia*, maka terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan kepada beberapa pihak. bagi pengelola pura sebagai salah satu kunci suksesnya program ini diharapkan dapat lebih kooperatif dalam memperkenalkan program QRIS kepada *pemedek* seperti memberikan arahan serta peletakkan logo QRIS BPD yang lebih strategis sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh *pemedek*. Bagi BPD Bali selaku penyedia jasa QRIS sebaiknya lebih menggalakkan sosialisasi penggunaan QRIS khususnya pada kegiatan *dana punia*, kondisi ini tercermin dari masih banyaknya pihak yang tidak mengetahui bahwa ada sistem QRIS yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran nontunai yang telah difungsikan pada kegiatan *dana punia*. Kondisi ini juga dapat dilihat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan sejauh ini hanya sebatas penggunaan QRIS dalam kegiatan UMKM yang belum menonjolkan pada kegiatan *dana punia* ini. Selain itu, diperlukan adanya evaluasi berkala karena terdapat beberapa *merchant* yang belum memahami penggunaan QRIS yang berimbas pada tidak difungsikannya program ini, serta bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu dijadikan landasan untuk kemudian dikembangkan ke penelitian yang membahas aspek lain baik dari segi jenis organisasi yang diteliti maupun implikasi dari QRIS ini.

DAFTAR RUJUKAN

CNN Indonesia. 2019. *APJII Catat 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai*

- Internet*. Diakses Pada: 3 Maret 2020.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190516103203-185-395333/apjii-catat-64-persen-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet>
- Depdikbud01. 2012. *Sesi Pendaftaran Siswa Baru*. Diakses Pada: 5 Mei 2020.
<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=21239>
- Handayani, Ni Putu Dian., et.al. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Sistem Dana punia Di Desa Pakraman Bangkang, Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*. Diakses Pada: 3 Maret 2020.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9860>
- Kominfo.go.id
- Kurniawan, Putu Sukma. 2016. *Peran Adat Dan Tradisi Dalam Proses Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)*. Diakses pada: 2 Maret 2020.
https://www.researchgate.net/publication/310528086_Peran_Adat_dan_Tradisi_dalam_Proses_Transparansi_dan_Akuntabilitas_Pengelolaan_Keuangan_Desa_Pakraman_Studi_Kasus_Desa_Pakraman_Buleleng_Kecamatan_Buleleng_Kabupaten_Buleleng_Provinsi_Bali
- M. Manulang. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Mantja, W. 2008. *Etnografi, Desain Penelitian Kualitatif Pendidikan dan Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran*. Malang: Elang Mas
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Martani, Dwi.2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat
- Moeloeng, Lexy., et.al. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi edisi keempat*. Jakarta: Salemba Empat
- Paranoan, N & C., Totanan. 2016. *Akuntabilitas Berbasis Karma*. Disajikan dalam Pertemuan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Nasional (TEMAN 4), Universitas Mercu Buana, Jakarta, 14-15 April 2016.
- Parisadha Hindu Dharma Indonesia. 2008. *Filosofi Dana punia: Bhisama Dana Punia*.:[Online], tersedia di:<http://www.parisadha.org>.
- Sawir, Muhammad. 2015. *Konsep Akuntabilitas Publik*. Diakses Pada: 3 Maret 2020.
<http://jurnal.uniyap.ac.id/index.php/jurnalfisip/article/download/395/352>
- Siagian, Sondang. P. 2004. *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid I. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Sudharta. 2009. *Sarasamuccaya Smerti Nusantara*. Surabaya: Paramita.

- Sudana, I Made. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiani, Luh Putu Dewi., et.al. 2017. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana punia Di Dadia Prebali, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng*. Diakses Pada: 2 Maret 2020. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/10747>
- Syaferiani, R. Fenny., et.al. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung*. Diakses pada: 1 Maret 2020. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=i&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiz-OXB2ajoAhW64zgGHT43AWQQFjABeqQIARAB&url=https%3A%2F%2Ffojs.unikom.ac.id%2Findex.php%2Fjati%2Farticle%2Fview%2F782%2F594&usq=AOvVaw15CauD9Amp6rlkdS2ofkpp>
- Widiantari, Yuni. 2014. *Akuntabilitas Dalam Menyajikan Laporan Keuangan Sektor Publik*. Diakses Pada: 3 Maret 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/4936/4/BAB%20II.pdf>